

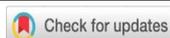
Menata Ulang Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan di Tengah Kesenjangan Mutu dan Akses Antara SMK Kota dan Desa

*Anggra Prima¹, Laili Komariyah², Lambang Subagiyo³, Warman⁴

¹ STAI Sangatta, Kutai Timur, Indonesia

^{2,3,4} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

*Email: primaanggra@gmail.com (Corresponding Author)



DOI: <https://doi.org/10.53621/jider.v5i3.533>

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: 19 Mei 2025

Revisi Akhir: 10 Juni 2025

Disetujui: 11 Juni 2023

Terbit: 30 Juni 2023

Kata Kunci:

Kesenjangan Akses;

Kesenjangan Mutu;

Manajemen;

Sekolah Menengah Kejuruan.



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan interpretasi berkaitan dengan menata ulang manajemen sekolah tentang ketimpangan kualitas dan akses pendidikan SMK Saat ini, Strategi manajemen SMK dalam menghadapi ketimpangan mutu dan akses antara SMK, serta kelebihan dan kekurangan strategi manajemen SMK di tengah kesenjangan mutu dan akses. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kutai Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldana, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan mutu dan akses pendidikan vokasi di wilayah Kutai Timur merupakan kenyataan yang nyata dan kompleks. SMK unggulan di pusat kabupaten telah mengadopsi berbagai inovasi seperti digitalisasi manajemen dan Teaching Factory yang produktif, sementara SMK di daerah pinggiran masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam aspek kerja sama industri, pendanaan, dan kualitas sumber daya manusia. Ketimpangan tersebut secara langsung mempengaruhi daya saing lulusan SMK dan memperlebar kesenjangan kesempatan kerja antarwilayah. temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa manajemen SMK perlu ditata ulang secara menyeluruh dan adaptif terhadap konteks lokal. Sistem pengelolaan yang responsif, partisipatif, serta berbasis potensi dan tantangan Desa menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan mutu dan akses. Perluasan kerja sama dengan industri lokal, penguatan kapasitas kepala sekolah, serta pembenahan sistem anggaran menjadi bagian dari solusi strategis yang harus segera diimplementasikan.

PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran strategis dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) vokasional yang siap kerja, kompeten, dan mampu bersaing di tengah dinamika kebutuhan industri yang terus berkembang (Garnadi et al., 2022; Yusof et al., 2020). Dalam konteks pembangunan nasional, SMK diarahkan tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan keterampilan kerja berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (Munthe & Mataputun, 2021). Peran utama SMK terletak pada *link and match* antara pendidikan dan pasar kerja. Lulusan SMK diharapkan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan karakter kerja (*soft skills*) yang sesuai dengan standar industri (Kumendong et al., 2018; Cahyono & Gunawan, 2024). Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis produktivitas tenaga kerja, khususnya dalam menghadapi bonus demografi dan persaingan regional di era *ASEAN Economic Community* (AEC) maupun Revolusi Industri 4.0.

SMK menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui program *teaching factory* (Novita & Nuriadin, 2023), unit produksi (Yuliansah & Rasyid, 2015), dan kerja sama dengan mitra industri setempat (Sulaeman et al., 2024). Dalam jangka panjang, SMK yang dikelola secara efektif dapat berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran usia muda (Kesumadewi & Aprilyani, 2024), mendorong kewirausahaan (Amelia et al., 2023), serta mempersempit kesenjangan sosial

dan ekonomi antarwilayah. Namun demikian, peran besar SMK dalam pembangunan SDM vokasional tidak akan optimal tanpa manajemen yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dunia kerja. Ketimpangan mutu dan akses antar wilayah menjadi tantangan serius yang harus segera ditata ulang melalui strategi manajerial yang tepat, inklusif, dan berbasis data.

Pada tahun ajaran 2024/2025, terjadi ketimpangan signifikan dalam distribusi SMK di Kutai Timur. Sangatta Utara sebagai pusat kabupaten memiliki 5 SMK (2 negeri, 3 swasta), sementara beberapa kecamatan seperti Muara Ancalong, Busang, Long Mesangat, Batu Ampar, Sandaran, dan Kaubun tidak memiliki SMK sama sekali. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan akses geografis pendidikan vokasional, memaksa siswa di daerah pelosok menempuh jarak jauh untuk bersekolah. Dari sisi tenaga pendidik, 181 guru SMK berada di Sangatta Utara (36% dari total guru SMK), sedangkan kecamatan seperti Karanganyar dan Rantau Pulung hanya memiliki 13–16 guru. Ketimpangan tersebut berdampak pada rasio guru-siswa dan mutu pembelajaran. Jumlah siswa SMK juga didominasi Sangatta Utara dengan 3.145 siswa (41% dari total siswa SMK), sedangkan beberapa kecamatan nyaris tidak memiliki peserta didik SMK sama sekali (BPS-Statistics Indonesia, 2025).

Sekolah di kota umumnya lebih mudah meraih akreditasi A atau B karena memiliki fasilitas penunjang praktik seperti laboratorium, ruang praktik, dan koneksi industri. SMK di daerah terpencil kerap menghadapi keterbatasan sarana TIK, bengkel praktik, dan peralatan industri terkini, membuat siswa kesulitan mengembangkan *hands-on skills*. Ketersediaan guru produktif bersertifikasi juga lebih tinggi di kota, karena lebih banyak guru dengan latar belakang teknis dan akses pelatihan berkelanjutan. SMK di kota seperti SMK Negeri 1 Sangatta Utara telah menjalin kerja sama dengan perusahaan lokal seperti tambang, agroindustri, dan perhotelan. Namun, banyak SMK di pedalaman belum memiliki kemitraan yang kuat, yang berdampak pada rendahnya pengalaman praktik kerja industri (Prakerin) siswa dan peluang kerja pasca lulus. Ketimpangan akses dan mutu antara SMK di Kota dan Desa di Kutai Timur menunjukkan perlunya strategi manajemen pendidikan yang terfokus pada pemerataan layanan vokasional. Tanpa upaya strategis, potensi besar pembangunan SDM vokasional di wilayah pedalaman akan terhambat.

Ketimpangan dalam mutu dan akses pendidikan kejuruan antara wilayah Kota dan Desa di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Timur, berdampak langsung pada dua aspek krusial: 1) keterserapan lulusan di dunia kerja dan 2) keadilan dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak. Lulusan SMK dari wilayah perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap: Fasilitas praktik (workshop, laboratorium) yang memadai, Guru produktif dengan latar belakang industri, Kerja sama industri untuk praktik kerja lapangan dan rekrutmen, Program link and match seperti kelas industri dan sertifikasi profesi. Hal tersebut membuat lulusan SMK kota lebih siap secara keterampilan dan administratif untuk memasuki dunia kerja (Hidayati et al., 2021). Sebaliknya, lulusan SMK di Desa dengan sarana terbatas, guru yang tidak merata, serta minimnya relasi industri, cenderung kurang terserap oleh pasar kerja atau terjebak dalam sektor informal dan pengangguran terbuka. Akibatnya, terjadi ketimpangan daya saing antar lulusan SMK, yang menambah disparitas sosial dan ekonomi.

Ketimpangan juga menggerus prinsip keadilan dan pemerataan pendidikan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tinggal di Desa tanpa SMK terpaksa: 1) Berpindah ke kota dengan biaya hidup dan transportasi yang tinggi, 2) Menyerah untuk tidak sekolah kejuruan, atau 3) Masuk SMK dengan kualitas rendah, yang pada akhirnya memperbesar kesenjangan sosial dan peluang kerja. Dalam konteks tersebut, pendidikan vokasional belum sepenuhnya menjadi alat mobilitas sosial, melainkan malah berpotensi melanggengkan ketimpangan antara Desa dan antarindividu. Hal tersebut bertentangan dengan mandat UUD 1945 Pasal 31 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu secara adil dan merata.

Penelitian tentang manajemen mutu: tantangan dan strategi di SMK pernah dilakukan oleh (Dewi et al., 2025) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Salah satu

pendekatan yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu pendekatan yang memberi wewenang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan sendiri sesuai kebutuhan. Penelitian oleh (Dewi et al., 2025) menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan di SMK masih menjadi tantangan, yang direspons melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) guna memberi otonomi pengelolaan sumber daya. Sementara itu, studi (Anggraini et al., 2025) menyoroti pentingnya optimalisasi pendanaan pendidikan di wilayah 3T melalui fleksibilitas dana BOS, kemitraan swasta, dan program beasiswa sebagai strategi pemerataan akses dan mutu, yang memerlukan sinergi antarpemerintah demi membangun SDM vokasional yang berdaya saing. Dan yang paling relevan adalah hasil penelitian dari (Ayuningtyas, 2021) yang mengkaji tentang ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur.

Penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara umum (Dewi et al., 2025), optimalisasi pendanaan di wilayah 3T (Anggraini et al., 2025), serta ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur (Ayuningtyas, 2021), namun belum secara spesifik menyoroti kesenjangan manajerial, mutu, dan akses pendidikan vokasional antara SMK di Kota dan Desa khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya, pemerataan guru produktif, kerja sama industri, serta efektivitas kebijakan di level lokal. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menelaah secara komprehensif aspek manajerial SMK yang berperan dalam memperlebar atau menyempitkan kesenjangan mutu dan akses antara SMK Kota dan Desa, serta merumuskan strategi manajerial berbasis data Desa (kasus Kutai Timur) yang lebih kontekstual dan aplikatif, sebagai upaya reformasi sistemik pendidikan vokasional di tingkat menengah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan interpretasi berkaitan dengan penataan ulang manajemen SMK dalam konteks ketimpangan kualitas dan akses pendidikan, mengidentifikasi strategi manajemen SMK dalam menghadapi kesenjangan antar wilayah, serta mengkaji kelebihan dan kekurangan strategi manajemen yang diterapkan saat ini. Penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap pengembangan kebijakan dan praktik manajemen di SMK. Dengan menganalisis kesenjangan dalam kualitas dan akses pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan empiris bagi pemerintah, pemangku kebijakan, dan pengelola SMK dalam merumuskan strategi manajerial yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan solutif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tujuan utama untuk memahami secara mendalam ketimpangan mutu dan akses pendidikan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di wilayah perkotaan dan pedesaan, serta untuk merumuskan strategi manajerial yang adaptif dan kontekstual dalam mengatasi persoalan tersebut. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara holistik, kontekstual, dan mendalam melalui penggalian makna dari pengalaman dan pandangan para informan (Creswell & Poth, 2016).

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain melalui tahapan studi pendahuluan, pengumpulan data, dan analisis data. Penelitian ini diawali dengan studi pendahuluan yang bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang menunjukkan kesenjangan signifikan dalam pendidikan vokasi. Berdasarkan hasil pengamatan awal dan telaah data sekunder, Kabupaten Kutai Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks, di mana terdapat perbedaan nyata antara SMK yang berada di pusat kabupaten dengan SMK di wilayah pinggiran. Ketimpangan tersebut mencakup aspek aksesibilitas, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan dunia industri, yang secara keseluruhan mencerminkan problematika nyata dalam pemerataan mutu pendidikan vokasi di daerah.

Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti laporan dari Kementerian Pendidikan, data (BPS Kutai Timur, 2023), serta artikel-artikel

ilmiah terkini yang relevan dengan isu ketimpangan pendidikan vokasi dan strategi manajemen pendidikan. Kajian ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memahami dinamika kebijakan pendidikan vokasi di Indonesia, termasuk faktor-faktor penyebab kesenjangan antara SMK di wilayah perkotaan dan pedesaan. Melalui studi literatur ini, peneliti memperoleh gambaran awal mengenai kondisi aktual pendidikan vokasi serta berbagai pendekatan manajerial yang telah diimplementasikan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam merumuskan instrumen pengumpulan data dan analisis temuan di lapangan (Kemdikbudristek, 2022; Scarpetta & di Noia, 2023).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap isu ketimpangan mutu dan akses pendidikan SMK yang diteliti. Informan kunci terdiri dari kepala SMK, guru produktif, pengawas sekolah, dan alumni, yang masing-masing memberikan perspektif berbeda namun saling melengkapi mengenai kondisi faktual di lapangan. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi empiris yang mendalam guna memperkaya dan mengkonfirmasi temuan dari hasil studi literatur dan dokumentasi yang telah dikumpulkan sebelumnya, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif dan relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2009).

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengakses data sekunder yang bersumber dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, yang mencakup berbagai aspek penting seperti distribusi tenaga pendidik, ketersediaan dan kelayakan fasilitas sekolah, jumlah peserta didik, status akreditasi sekolah, serta bentuk kerja sama yang terjalin antara sekolah dengan dunia industri. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang faktual, objektif, dan sistematis mengenai kondisi nyata pendidikan vokasi di berbagai wilayah, sehingga dapat memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis kesenjangan mutu dan akses pendidikan antar-SMK. Data ini juga didukung oleh regulasi terkait seperti Permendikbud No. 36 Tahun 2014 serta laporan statistik terkini dari (BPS Kutai Timur, 2023) yang memperkuat validitas temuan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014, p. h. 31), yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kondensasi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan informasi yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan guna mempermudah pemahaman terhadap hubungan antar data. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses sintesis terhadap keseluruhan data yang telah dianalisis untuk menemukan makna dan implikasi dari fenomena yang dikaji. Model ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk berinteraksi secara terus-menerus dengan data selama proses pengumpulan dan analisis, sehingga menghasilkan temuan yang dinamis, mendalam, dan kontekstual.

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan studi literatur guna memastikan konsistensi dan validitas data. Validitas data semakin diperkuat melalui proses member checking, yaitu pengembalian hasil temuan sementara kepada informan kunci untuk dikonfirmasi kebenarannya. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa interpretasi data yang dilakukan peneliti sesuai dengan pengalaman dan pandangan para informan di lapangan, sebagaimana dianjurkan oleh (Lincoln & Guba, 1985) serta (Moleong, 2021).

Dengan rangkaian tahapan yang sistematis mulai dari studi pendahuluan, pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur, hingga proses analisis interaktif serta validasi melalui triangulasi dan member checking, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang mendalam, akurat, dan kontekstual. Penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu menggambarkan realitas ketimpangan mutu dan akses pendidikan vokasi secara komprehensif, tetapi juga memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan manajemen SMK

yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan lokal di wilayah Kutai Timur maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data tahun ajaran 2024/2025, ditemukan ketimpangan yang mencolok dalam hal jumlah sekolah, guru, serta peserta didik SMK antara wilayah perkotaan dan pedesaan lainnya di Kabupaten Kutai Timur. Temuan tersebut mengindikasikan adanya disparitas signifikan dalam penyediaan layanan pendidikan vokasional yang berdampak pada keadilan akses dan mutu pembelajaran kejuruan. Sangatta Utara, sebagai ibu kota kabupaten, tercatat memiliki konsentrasi tertinggi lembaga pendidikan kejuruan, yakni sebanyak lima SMK (dua negeri dan tiga swasta). Daerah Sangatta menjadi pusat utama penyelenggaraan pendidikan vokasional, diikuti oleh wilayah Sangkulirang dan Bengalon. Sebaliknya, sejumlah kecamatan seperti Muara Ancalong, Busang, Long Mesangat, Batu Ampar, Sandaran, dan Kaubun sama sekali tidak memiliki SMK. Kondisi tersebut menyebabkan siswa dari wilayah pelosok harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengakses pendidikan kejuruan, sehingga memicu potensi putus sekolah atau ketidaktertarikan melanjutkan ke jenjang SMK.

Kesenjangan tersebut juga terlihat dalam distribusi tenaga pendidik. Sangatta Utara memiliki 181 guru SMK, yang berarti hampir 36% dari total guru SMK se-Kutai Timur berada di satu wilayah saja. Sementara di wilayah seperti Karangas dan Rantau Pulung, jumlah guru SMK hanya berkisar antara 13 hingga 16 orang (BPS-Statistics Indonesia, 2025). Secara umum, masih terdapat kekurangan guru produktif di SMK, yang diatasi dengan melibatkan pelaku industri sebagai guru tamu (Kaltim Faktual, 2023). Ketimpangan tersebut menyebabkan rasio guru dan siswa menjadi tidak ideal di Desa, dan berimplikasi pada rendahnya efektivitas proses pembelajaran serta terbatasnya pembimbingan praktek kejuruan secara intensif. Jumlah peserta didik pun memperlihatkan dominasi wilayah kota. Tercatat 3.145 siswa SMK berasal dari Sangatta Utara, mencakup hampir 41% dari total siswa SMK di seluruh Kutai Timur. Disisi lain, beberapa kecamatan seperti Batu Ampar dan Muara Ancalong nyaris tidak memiliki siswa SMK, mencerminkan lemahnya daya jangkauan pendidikan vokasional di Desa-Desa terpencil.

Temuan lain juga menunjukkan bahwa SMK yang berada di wilayah kota relatif lebih mudah mendapatkan akreditasi A atau B karena memiliki fasilitas penunjang pembelajaran praktik yang lebih lengkap. Sekolah-sekolah tersebut umumnya telah dilengkapi dengan laboratorium, bengkel praktik, perangkat TIK, dan menjalin kemitraan industri yang kuat. Sebaliknya, SMK di wilayah terpencil seringkali terkendala oleh minimnya sarana dan prasarana, serta terbatasnya guru produktif bersertifikasi yang memiliki latar belakang teknis maupun akses terhadap pelatihan berkelanjutan. Kerja sama dengan industri juga menunjukkan pola yang timpang. SMK di perkotaan, seperti SMK Negeri 1 Sangatta Utara, telah berhasil menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan lokal, termasuk sektor tambang, agroindustri, dan perhotelan (Kemdikbud RI, 2023). Hal tersebut mendukung keberlangsungan program praktik kerja industri (Prakerin) dan meningkatkan peluang kerja lulusan. Namun, banyak SMK di wilayah pedalaman belum memiliki jaringan kemitraan yang memadai, sehingga pengalaman praktik siswa menjadi terbatas dan tidak optimal.

Terjadi ketimpangan serius antara SMK di wilayah Kota dan Desa dalam hal akses, mutu, dan daya dukung pembelajaran vokasional. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi manajerial yang lebih inklusif dan berbasis pemerataan sumber daya pendidikan. Jika tidak ditangani secara sistematis, potensi pengembangan sumber daya manusia vokasional di Desa akan terus terhambat dan memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kutai Timur.

Tabel 1. Data Ketimpangan SMK di Kota Sangatta dan Luar Kota Sangatta.

Aspek	SMK di Wilayah Kota (Sangatta Utara)	SMK di Luar Sangatta
Fasilitas	Memiliki fasilitas yang relatif lengkap, termasuk laboratorium, bengkel praktik, dan ruang kelas yang memadai.	Fasilitas cenderung terbatas, dengan keterbatasan pada laboratorium dan peralatan praktik.
Jumlah Guru	Lebih banyak memiliki guru, termasuk guru produktif yang mengajar mata pelajaran kejuruan. Masih terdapat kekurangan guru produktif, diatasi dengan melibatkan pelaku industri sebagai guru tamu.	Mengalami kekurangan guru yang lebih signifikan, terutama dalam bidang kejuruan. Upaya kolaborasi dengan dunia industri sebagai solusi alternatif masih terbatas.
Penerapan Teaching Factory (TEFA)	Lebih banyak menerapkan konsep teaching factory, melibatkan siswa dalam proses produksi nyata.	Penerapan teaching factory masih terbatas, dengan kendala pada fasilitas dan kemitraan industri.
Kemitraan dengan Industri	Lebih aktif menjalin kerja sama dengan industri, mendukung magang, penyediaan guru tamu, dan pengembangan kurikulum.	Kemitraan dengan industri masih terbatas, berdampak pada kurangnya dukungan dalam pembelajaran praktik.
Dampak Kemitraan	Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.	Diperlukan upaya lebih lanjut untuk membangun jaringan kerja sama dengan sektor industri.

*Sumber: Kemdikbud; Kaltimetam.id.; Kaltim Faktual, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Kaltim Faktual, Kaltimtoday.co

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada beberapa SMK di wilayah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen sekolah vokasional dalam menghadapi ketimpangan akses dan mutu pendidikan dilakukan dengan berbagai strategi adaptif, meskipun hasilnya belum merata di semua wilayah. Tabel di atas menjadi pijakan untuk menata ulang manajemen sekolah sehingga mampu meminimalisir ketimpangan yang terjadi antara SMK di Kota dengan SMK yang ada di Desa.

Kepala sekolah di SMK unggulan seperti SMK Negeri 1 Sangatta Utara menerapkan manajemen berbasis mutu (*Total Quality Management*) dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM, pembaruan kurikulum, serta penguatan kerja sama dengan industri lokal. Kepala sekolah juga secara aktif mengikutsertakan guru dalam pelatihan dan workshop kejuruan tingkat regional dan nasional untuk meningkatkan kompetensi guru produktif. Di wilayah yang kekurangan guru, seperti SMK di Kecamatan Rantau Pulung dan Karanganyar, kepala sekolah berinovasi dengan menjalin kemitraan informal bersama pelaku industri lokal untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik. Mereka mengundang teknisi berpengalaman dari perusahaan tambang dan perbengkelan lokal untuk menjadi guru tamu dalam pelajaran praktik. Namun, keterbatasan dana dan akses informasi menjadi kendala utama dalam implementasinya.

SMK di wilayah kota seperti Sangatta mendapatkan dukungan anggaran yang lebih memadai dari pemerintah daerah maupun dana BOS Afirmasi, sehingga lebih leluasa dalam melakukan pengadaan alat praktik dan pengembangan *teaching factory* (TEFA). Sebaliknya, SMK di pedalaman mengeluhkan kurangnya bantuan alat praktik yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Sebagai solusi, beberapa sekolah melakukan pengelolaan mandiri berbasis kewirausahaan sekolah (*school entrepreneurship*) seperti menjual produk hasil praktik siswa (contoh: mebel, kerajinan tangan, servis motor), yang kemudian digunakan sebagai sumber dana tambahan untuk perawatan fasilitas atau pengadaan bahan praktek.

Sekolah di Sangatta Utara memiliki manajemen kemitraan industri yang lebih mapan, ditunjang oleh posisi geografis yang strategis dan kedekatannya dengan perusahaan besar. SMK Negeri 1 Sangatta Utara bahkan memiliki MoU aktif dengan beberapa perusahaan tambang dan hotel di Kutai Timur, sehingga mampu menyelenggarakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) secara optimal. Sementara itu, sekolah di Desa seperti SMK di Muara Wahau dan Busang menghadapi tantangan dalam menjalin kemitraan karena keterbatasan industri lokal.

Beberapa SMK di wilayah terpencil di luar kota Sangatta mulai memanfaatkan platform pembelajaran digital untuk mengakses materi kejuruan dan pelatihan daring dari pusat. Kepala sekolah memfasilitasi guru untuk mengikuti pelatihan daring yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV). Namun, keterbatasan jaringan internet dan sarana TIK juga masih menjadi hambatan dalam implementasi maksimal.

Pembahasan

Ketimpangan Kualitas dan Akses Pendidikan Vokasional Saat ini

Kondisi ketimpangan antara SMK di wilayah Kota dan Desa di Kutai Timur mencerminkan adanya disparitas spasial pendidikan vokasional yang signifikan. Ketimpangan tersebut meliputi aspek fasilitas, jumlah guru, jumlah peserta didik, serta kemitraan industri yang berdampak pada mutu pendidikan kejuruan secara keseluruhan. Seperti disparitas Akses dan Pemerataan Lembaga. Jika merujuk pada teori keadilan sosial John Rawls dalam (Bietti, 2021), pendidikan sebagai hak dasar harus diberikan secara merata demi menciptakan peluang yang adil bagi setiap individu, terlepas dari lokasi geografisnya. Namun dalam konteks Kutai Timur, terjadi konsentrasi lembaga SMK di Sangatta Utara, sementara beberapa kecamatan lainnya tidak memiliki SMK sama sekali. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan "*educational exclusion*", yaitu pengucilan kelompok masyarakat dari akses pendidikan karena faktor geografis. Menurut (Anggraini et al., 2025) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa distribusi lembaga vokasi yang tidak merata menjadi penghambat utama peningkatan kompetensi kerja di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Dalam konteks Kutai Timur, kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang mengatakan bahwa siswa dari wilayah terpencil harus menempuh perjalanan jauh yang mengakibatkan risiko putus sekolah atau rendahnya minat terhadap SMK.

Berikutnya, berkaitan dengan ketimpangan kualitas guru, terutama guru produktif, memperkuat hasil kajian Teori Input-Output dalam Pendidikan yang menyatakan bahwa kualitas input (guru, sarana) sangat menentukan kualitas output pendidikan (Drobetz et al., 2025). Sangatta Utara yang memiliki 181 guru SMK 36% dari total guru se-Kutai Timur mengindikasikan konsentrasi SDM di satu wilayah, sementara daerah lain mengalami kekurangan parah. Kondisi tersebut diperburuk dengan minimnya pelatihan berkelanjutan bagi guru di Desa. Sebagaimana diungkap dalam penelitian (Ismiatun et al., 2023) guru kejuruan di Desa menghadapi keterbatasan dalam mengikuti pelatihan berbasis industri, yang berdampak pada stagnasi kompetensi mengajar dan adaptasi kurikulum industri.

Kesenjangan Fasilitas dan praktik *teaching factory* juga demikian, diminta jika dikaitkan dengan Konsep *Teaching Factory* (TEFA) menekankan pembelajaran berbasis produksi yang selaras dengan dunia industri. Namun, keberhasilan implementasi TEFA sangat dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas praktik, laboratorium, dan kemitraan industri. Seperti tampak pada tabel data, SMK di wilayah kota lebih banyak menerapkan TEFA karena memiliki fasilitas dan jejaring kerja sama industri yang memadai. Penelitian oleh (Hartanto et al., 2019) memperkuat argumen di atas, bahwa keterbatasan infrastruktur dan lemahnya kerja sama industri menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan *teaching factory* secara efektif di Desa.

Lalu berkenaan dengan kemitraan industri dan kesiapan kerja, dimana SMK di kota seperti di Sangatta menunjukkan keunggulan dalam membangun jejaring kemitraan dengan industri. Hal tersebut konsisten dengan teori Link and Match antara pendidikan vokasi dan industri, yang menyatakan bahwa pembelajaran vokasional akan efektif bila didukung oleh sinergi kurikulum dan praktek dunia kerja. SMK Negeri 1 Sangatta Utara, misalnya, menjalin kemitraan dengan sektor tambang dan perhotelan, memberikan peluang Prakerin yang berkelanjutan. Sebaliknya,

SMK di Desa mengalami kesenjangan dalam jejaring industri. Akibatnya, siswa tidak mendapat pengalaman praktik optimal, sehingga menghambat pengembangan *soft skill* dan *hard skill* mereka, yang berpengaruh langsung terhadap rendahnya daya saing lulusan.

Ketimpangan pendidikan vokasional di atas tidak hanya menjadi isu pendidikan, tetapi juga menjadi persoalan pembangunan sumber daya manusia Desa. Jika dibiarkan, hal tersebut akan memperlebar "*development gap*" antara pusat kota dan wilayah pinggiran di Kutai Timur. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi manajerial pendidikan vokasi yang berorientasi pada: Pemerataan lembaga dan guru kejuruan. Insentif khusus bagi guru produktif di daerah. Revitalisasi SMK berbasis kawasan dan potensi Desa. Penguatan *Teaching Factory* berbasis komunitas lokal. Fasilitasi kerja sama industri untuk Desa melalui kebijakan afirmatif oleh pemerintah daerah.

Ketimpangan dalam pendidikan vokasional ini bukan hanya menjadi isu pendidikan semata, tetapi juga berimplikasi langsung pada pembangunan sumber daya manusia di wilayah pedesaan. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini akan memperlebar jurang pembangunan (*development gap*) antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kutai Timur. Untuk itu, dibutuhkan strategi manajerial pendidikan vokasi yang meliputi: Pemerataan lembaga pendidikan dan distribusi guru kejuruan, Insentif bagi guru produktif di daerah, Revitalisasi SMK berbasis potensi lokal, Penguatan *Teaching Factory* berbasis komunitas, serta Kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah dalam mendorong kemitraan industri untuk sekolah di desa.

Strategi Manajemen SMK dalam Menghadapi Ketimpangan Mutu dan Akses

Strategi manajemen yang diterapkan dalam menghadapi ketimpangan mutu dan akses SMK di Kabupaten Kutai Timur dilakukan melalui penerapan Penerapan sistem evaluasi mutu internal (*Internal Quality Assurance System*). Strategi tersebut mulai dijalankan secara bertahap di SMK-SMK negeri di Sangatta, yang bertujuan untuk memantau pencapaian kompetensi siswa, efektivitas program kejuruan, serta kepuasan mitra industri. Namun, di SMK yang berada di Desa, pelaksanaan monitoring belum terstruktur akibat keterbatasan SDM manajerial dan kurangnya supervisi dari dinas pendidikan setempat.

Data di atas menunjukkan bahwa strategi manajemen pendidikan vokasional di Kutai Timur menunjukkan upaya adaptif dalam mengatasi ketimpangan akses dan mutu, terutama antara SMK di wilayah perkotaan (Sangatta Utara) dan daerah-daerah terpencil.

Perencanaan Berbasis Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Lokal

Perencanaan SMK seharusnya tidak bersifat seragam, melainkan menyesuaikan dengan potensi lokal wilayah masing-masing. Di kecamatan yang belum memiliki SMK, pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan perlu melakukan pemetaan potensi wilayah untuk menentukan kompetensi keahlian yang relevan dan menjanjikan secara ekonomi. Seperti di wilayah Bengalon dan Rantau Pulung, program keahlian berbasis pertanian, perkebunan, atau teknologi tepat guna akan lebih kontekstual dibandingkan program perhotelan yang lebih cocok di perkotaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip "link and match", yaitu keterkaitan antara pendidikan dan dunia kerja. Strategi ini juga dapat memperkuat kemandirian ekonomi desa karena lulusan SMK tidak perlu migrasi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan.

Penerapan Manajemen Berbasis Mutu (*Total Quality Management*)

SMK unggulan seperti SMK Negeri 1 Sangatta Utara telah mengadopsi prinsip Total Quality Management (TQM), yaitu model manajemen pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dan berkesinambungan. TQM menekankan pentingnya keterlibatan semua komponen sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mutu pendidikan, termasuk kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)(Harliansyah et al., 2022). Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin transformasional yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membangun visi bersama dengan guru dan industri mitra. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Hartley, 2023) bahwa manajemen

pendidikan modern harus mampu mengintegrasikan visi institusional dengan perubahan lingkungan eksternal.

Strategi Pengadaan Guru dan SDM Produktif

Distribusi guru yang tidak merata menyebabkan munculnya strategi kreatif dari kepala sekolah di Desa, seperti mengundang pelaku industri sebagai guru tamu. Hal tersebut sejalan dengan pendekatan *link and match* dalam pendidikan vokasional, yang menghubungkan kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi yang diajarkan di sekolah (Irwanto, 2021). Namun, keterbatasan sertifikasi dan pelatihan bagi guru di wilayah terpencil menjadi tantangan tersendiri. Penelitian oleh (Bidol, 2024) menyebutkan bahwa banyak guru produktif di Desa tertinggal di Kalimantan Timur tidak memiliki latar belakang pendidikan teknik formal, sehingga kualitas pembelajaran praktik menjadi tidak optimal, demikian juga yang terjadi di Kalimantan Barat (Wahidah & Istiyono, 2020).

Manajemen SDM merupakan aspek vital dalam peningkatan mutu pendidikan. SMK yang berada di wilayah non-perkotaan perlu difasilitasi secara khusus untuk peningkatan kapasitas guru, khususnya guru produktif. Strategi ini dapat dilakukan melalui: Program in-service training berbasis industri, Sertifikasi kompetensi guru, Pertukaran guru antar sekolah, dan Penugasan guru bergilir dari sekolah induk (misalnya dari Sangatta Utara) ke sekolah-sekolah satelit di pedesaan. Selain itu, peran kepala sekolah sebagai manajer pendidikan harus diperkuat. Kepala sekolah harus mampu menjalin kemitraan dengan dunia usaha lokal, membangun branding sekolah, serta mengelola sumber daya terbatas dengan inovatif. Menurut hasil riset Astuti et al. (2021), kepala sekolah yang memiliki kompetensi kepemimpinan transformasional dapat mengubah SMK biasa menjadi unggul, meskipun dalam keterbatasan sarana.

Teaching Factory (TEFA) dan Wirausaha

Sekolah Beberapa SMK di perkotaan telah mengembangkan teaching factory sebagai model pembelajaran berbasis produksi nyata. Model tersebut bukan hanya menjembatani teori dan praktik, tetapi juga menjadi sumber pendanaan alternatif bagi sekolah (Nurtanto et al., 2017). Sebaliknya, SMK di Desa mengembangkan school entrepreneurship sebagai bentuk respons terhadap keterbatasan dana. Strategi tersebut menunjukkan bahwa manajemen sekolah di Desa beradaptasi secara kontekstual, meskipun tantangan pemasaran produk siswa dan keberlanjutan usaha masih menjadi hambatan.

Implementasi Teaching Factory tidak harus meniru model industri besar di kota. SMK di desa dapat mengembangkan mini factory berbasis potensi lokal. Misalnya, SMK dengan kompetensi keahlian agribisnis dapat mengembangkan unit produksi pupuk organik, hasil olahan pertanian, atau teknologi irigasi sederhana. Strategi ini memungkinkan siswa belajar secara praktik, sekaligus membentuk kewirausahaan lokal. TEFA berbasis komunitas ini dapat disinergikan dengan BUMDes, koperasi desa, atau UMKM lokal sebagai mitra produksi dan pemasaran. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan di beberapa daerah 3T lainnya seperti di SMK di Kabupaten Alor dan Lembata (Kemdikbud, 2022).

Kesenjangan Akses Digital dan Inovasi Teknologi

Pemanfaatan teknologi digital untuk pelatihan daring di SMK pedalaman menjadi langkah progresif dalam memperluas akses pembelajaran. Namun, seperti diungkapkan oleh OECD, akses teknologi belum otomatis menjamin peningkatan mutu jika tidak disertai dengan infrastruktur pendukung dan pelatihan guru (Indicators, 2013). Masalah keterbatasan jaringan internet dan perangkat digital menjadi penghambat utama dalam pemerataan teknologi pendidikan di Kutai Timur.

Evaluasi Mutu dan Supervisi Dinas Pendidikan

Monitoring mutu secara internal sudah mulai dilakukan di SMK-SMK unggulan melalui *sistem Internal Quality Assurance System (IQAS)*, namun di Desa-Desa, pengawasan tersebut

belum berjalan efektif karena kurangnya SDM manajerial yang terlatih serta keterbatasan supervisi dari dinas pendidikan. Penelitian Alpony dkk. menunjukkan bahwa lemahnya supervisi pendidikan di Desa berdampak langsung pada stagnasi mutu dan tidak berkembangnya inovasi manajerial sekolah (Alpony et al., 2024).

Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Dunia Industri, dan Masyarakat Ketimpangan kemitraan industri dapat diatasi melalui kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah. Pemda Kutai Timur perlu mengeluarkan regulasi yang mendorong perusahaan, terutama yang bergerak di sektor tambang dan perkebunan, untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam bidang pendidikan vokasional. Bentuk kerja sama ini dapat berupa: Penyediaan tempat magang, Pembangunan workshop sekolah, Penyediaan beasiswa kejuruan, Dan pelatihan guru industri. Selain itu, masyarakat desa perlu dilibatkan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Melalui komite sekolah, lembaga adat, dan tokoh lokal, program-program pemberdayaan berbasis sekolah akan lebih mudah diterima dan berkelanjutan.

Dengan demikian strategi manajemen SMK di Kutai Timur menunjukkan dinamika adaptif yang dipengaruhi oleh letak geografis, kapasitas manajerial, dan kemitraan eksternal. Meskipun terdapat inisiatif kreatif, ketimpangan tetap mencolok akibat keterbatasan dukungan sistemik dan kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan pemerataan vokasional yang berbasis kebutuhan lokal dan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menjamin keadilan akses dan mutu pendidikan vokasional.

Kelebihan dan Kekurangan Strategi Manajemen SMK Saat ini

Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kutai Timur memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaan dan pengelolannya. Letak geografis, latar belakang ekonomi masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah menjadi variabel penting yang mempengaruhi kinerja manajerial sekolah. Dari hasil observasi dan wawancara di beberapa SMK, dapat diidentifikasi sejumlah kelebihan dan kekurangan dalam manajemen SMK saat ini.

Manajemen SMK di Kutai Timur, khususnya di sekolah-sekolah unggulan yang berada di pusat kabupaten, menunjukkan sejumlah kelebihan yang cukup menonjol. Salah satu bentuk kemajuan tersebut tampak pada aspek digitalisasi sistem akademik dan administrasi sekolah. Digitalisasi yang diterapkan melalui berbagai instrumen seperti penggunaan aplikasi e-learning, sistem presensi berbasis digital, hingga pelaporan kinerja akademik secara daring (Marginingsih et al., 2025). Implementasi teknologi informasi tersebut secara signifikan meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah, mempercepat proses pelayanan terhadap peserta didik, serta menciptakan transparansi dalam sistem manajerial sekolah. Kehadiran sistem digital tersebut juga menunjukkan kemampuan adaptasi manajemen sekolah terhadap tantangan zaman serta dukungan terhadap budaya kerja yang akuntabel dan modern.

Kelebihan lain yang patut diapresiasi adalah keberhasilan beberapa SMK dalam menjalankan program *Teaching Factory* (TEFA). Model pembelajaran TEFA menekankan pada pengalaman kerja nyata, di mana peserta didik dilibatkan langsung dalam proses produksi atau layanan layaknya lingkungan industri profesional. Aktivitas TEFA tersebut tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis siswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, tetapi juga memberi peluang bagi sekolah untuk membangun unit produksi mandiri yang berkontribusi pada pendapatan sekolah. Hal tersebut menjadi indikator bahwa manajemen SMK telah berhasil mengembangkan strategi pembelajaran berbasis industri yang inovatif dan berkelanjutan. Digitalisasi dan *Teaching Factory* menjadi bukti bahwa sebagian SMK di Kutai Timur telah mengimplementasikan praktik manajemen berbasis mutu dan relevansi, yang selaras dengan semangat revitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia.

Adapun kekurangannya, meskipun beberapa SMK di Kutai Timur telah menunjukkan kemajuan dalam aspek digitalisasi dan pembelajaran berbasis industri, namun masih terdapat sejumlah tantangan serius yang dihadapi oleh SMK lainnya, khususnya yang berada di wilayah pinggiran. Salah satu kendala utama adalah minimnya kerja sama dengan Dunia Usaha dan

Dunia Industri (DUDI). Sekolah-sekolah di Desa terpencil mengalami kesulitan dalam menjalin kemitraan yang relevan dengan sektor industri, akibat letak geografis yang jauh dari pusat industri serta keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi. Hal tersebut menyebabkan program link and match tidak berjalan secara optimal, sehingga siswa tidak memperoleh pengalaman magang atau pelatihan industri yang dibutuhkan untuk mendukung kesiapan kerja. Temuan tersebut sejalan dengan temuan (Husni et al., 2024), bahwa keberhasilan kerja sama antara SMK dan industri sangat bergantung pada kedekatan lokasi dan jejaring historis yang telah terbangun.

Kekurangan lainnya terletak pada aspek pendanaan, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Banyak SMK di wilayah pinggiran yang sangat bergantung pada dana BOS dan BOSDA untuk menopang operasional sekolah. Sayangnya, alokasi dana BOSDA yang diterima tidak proporsional, serta belum memperhatikan kebutuhan spesifik sekolah kejuruan seperti pembelian bahan praktik, perawatan alat industri, dan pelatihan tenaga pengajar (Sudiyono, 2017). Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan inovasi dan membuat manajemen sekolah tidak leluasa dalam mengembangkan program-program unggulan berbasis kejuruan.

Rendahnya jumlah guru produktif yang tersertifikasi juga menjadi persoalan serius. Banyak guru produktif di SMK, terutama di daerah pinggiran, yang belum memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan kompetensi yang mereka ajarkan. Sebagian guru berasal dari latar belakang non-teknik dan minim pengalaman industri, sehingga pendekatan pembelajaran cenderung bersifat teoritis dan kurang aplikatif. Situasi tersebut tentu bertentangan dengan prinsip pendidikan vokasi yang menuntut pendekatan *work-based learning* dan *competency-based training*, di mana siswa seharusnya mendapatkan pengalaman belajar yang langsung relevan dengan dunia kerja (Raimon Efendi & Ratih Agustin Wulandari, 2020).

Dengan demikian, kelebihan manajemen SMK di Kutai Timur terletak pada inovasi digital dan penguatan teaching factory di SMK unggulan. Namun, tantangan serius masih dihadapi oleh SMK yang berada di wilayah marginal, terutama dalam aspek kolaborasi industri, pendanaan yang adil, dan kualitas guru produktif. Ketimpangan tersebut mencerminkan perlunya kebijakan afirmatif dan diferensiasi manajemen pendidikan vokasional berdasarkan konteks lokal. Upaya mengatasi ketimpangan mutu dan akses antar SMK di wilayah Kutai Timur, dibutuhkan strategi yang bersifat reformatif dan kolaboratif, baik dari sisi manajemen internal sekolah maupun dukungan eksternal dari pemerintah daerah dan dunia industri.

Kebijakan Pemetaan dan Pemerataan SMK

Pemerintah daerah perlu menyusun roadmap pengembangan SMK yang berbasis data spasial dan potensi lokal. Peta kebutuhan SMK harus mencakup distribusi penduduk usia sekolah, proyeksi kebutuhan tenaga kerja lokal, dan aksesibilitas wilayah. Hasil dari pemetaan ini menjadi dasar untuk: Pendirian SMK baru di wilayah yang belum terlayani (seperti Bengalon, Rantau Pulung), Penyesuaian jurusan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, dan Penempatan guru dan infrastruktur secara proporsional. Kebijakan afirmatif ini akan menjadi langkah strategis dalam mengurangi ketimpangan akses dan mendorong pembangunan wilayah berbasis pendidikan.

Reformasi Manajerial SMK

Reformasi manajemen sekolah menjadi kebutuhan mendesak, terutama di SMK yang masih tertinggal secara mutu dan akses. Strategi reformasi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah: a) Pelatihan kepala sekolah berbasis manajemen strategik, b) Penempatan guru produktif secara merata melalui kebijakan afirmatif, c) Penguatan Teaching Factory melalui kemitraan lokal (BUMDesa/Mitra UMKM) Peningkatan dana BOSDA afirmatif untuk SMK pinggiran.

Strategi Kolaboratif Multi-Pihak

Selain reformasi internal, penguatan manajemen SMK juga memerlukan strategi kolaboratif lintas sektor, seperti: a) Sinergi pemerintah daerah, industri, sekolah dalam pemetaan potensi lokal, b) Digitalisasi manajemen dan pembelajaran melalui platform vokasi online, dan c) Pembentukan forum koordinasi antar SMK.

Implikasi lain dari temuan ini adalah pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan institusi pendidikan tinggi dalam pengembangan SMK. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi: Forum kemitraan SMK dan industri lokal, Program pendampingan industri terhadap sekolah, Dan skema magang serta link and match berbasis kebutuhan lokal. Kemitraan ini bukan hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial SMK sebagai lembaga pendidikan yang berperan langsung dalam pembangunan ekonomi daerah. Ketimpangan akses terhadap pendidikan di daerah terpencil dapat dijumpai melalui teknologi. Dengan langkah ini, SMK dapat menjalankan model pembelajaran hybrid dan memperluas jangkauan pembelajaran ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh guru produktif..

Ketimpangan akses terhadap pendidikan di daerah terpencil dapat dijumpai melalui teknologi. Oleh karena itu, implikasi kebijakan yang perlu dilakukan adalah: Peningkatan infrastruktur internet di daerah pedalaman, Penyediaan perangkat belajar digital bagi siswa dan guru, Serta pelatihan literasi digital secara sistematis. Dengan langkah ini, SMK dapat menjalankan model pembelajaran hybrid dan memperluas jangkauan pembelajaran ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh guru produktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan mutu dan akses pendidikan vokasi antara SMK di wilayah perkotaan dan pedesaan di Kutai Timur merupakan persoalan struktural yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan fasilitas fisik, tetapi juga dengan pola manajemen yang belum kontekstual dan adaptif terhadap karakteristik lokal. Penelitian ini secara eksplisit menjawab tujuan untuk memahami ketimpangan tersebut dan merumuskan strategi manajerial yang relevan, dengan menekankan pentingnya menata ulang manajemen Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di tengah kesenjangan mutu dan akses antara SMK kota dan desa. Penataan ulang ini harus dilakukan melalui penguatan kepemimpinan sekolah yang partisipatif, peningkatan kapasitas manajerial kepala sekolah, pengembangan kerja sama strategis dengan industri lokal, serta penerapan kebijakan afirmatif yang mendorong pemerataan anggaran dan sumber daya manusia. Dengan manajemen yang responsif dan berbasis potensi lokal, SMK di daerah pinggiran tidak hanya akan mampu mengejar ketertinggalan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan keadilan pendidikan vokasi secara berkelanjutan dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpony, A., Waruwu, M., & Enawaty, E. (2024). Supervisi Kolaboratif: Strategi Efektif dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan di Sekolah Pedalaman dan Terpencil. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 444–455. <https://doi.org/10.23969/jp.v9i3.19242>
- Amelia, R., Rizkan, M., & Sukma Mulya, K. (2023). Mendorong Jiwa Entrepreneurship Pelajar SMK Melalui Seminar Kewirausahaan. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1 SE-Artikel), 37–45. <https://doi.org/10.61461/sjpm.v2i1.24>
- Anggraini, A., Ferdianna, A. P., Dewi, K., Rofikhoh, W., & Kharismaputra, A. P. (2025). Strategi Optimalisasi Pendanaan Pendidikan di Daerah 3T: Tantangan dan Solusi untuk Pemerataan Akses dan Kualitas. *Cendikia: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(1), 71–80. <https://jurnal.researchideas.org/index.php/cendikia/article/view/82>
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan Akses Pendidikan di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128>

- Bidol, S. (2024). Analisis Ketersediaan Sumber Daya dan Proses Pengembangan Kurikulum Terhadap Kebutuhan Industri Dimediasi oleh Mutu Pendidikan Di SMK Negeri 8 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen (JEM)*, 6(1). <https://journalpedia.com/1/index.php/jem/article/view/728>
- Bietti, E. (2021). From Ethics Washing to Ethics Bashing: A Moral Philosophy View on Tech Ethics. *Journal of Social Computing*, 2(3), 266–283. <https://doi.org/10.23919/JSC.2021.0031>
- BPS-Statistics Indonesia. (2025). *Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, 2024/2025*. BPS Statistics Indonesia Kutai Timur Regency. <https://kutimkab.bps.go.id/en/statistics-table/3/>
- BPS Kutai Timur. (2023). *Statistik Pendidikan Kutai Timur 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Cahyono, Y. R., & Gunawan, A. (2024). Pentingnya Memiliki Soft Skill Bagi Calon Pekerja Sebagai Keterampilan Kesiapan Kerja. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(3), 357–361. <https://doi.org/https://jurnal.itcc.web.id/index.php/jebd/article/view/515>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage publications.
- Dewi, D. N., Haryati, T., & Wuryandini, E. (2025). Manajemen Mutu Berbasis Sekolah: Tantangan dan Strategi di SMK Negeri 1 Jepon. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 494–499. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i1.1821>
- Drobetz, W., Hornuf, L., Momtaz, P. P., & Schermann, N. (2025). Token-based crowdfunding: Investor choice and the optimal timing of initial coin offerings. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 49(1), 232–282. <https://doi.org/10.1177/10422587241261625>
- Garnadi, A., Helmawati, R. Y., & Yosepty, R. (2022). Manajemen Kelas Industri dan Industri Dunia Kerja (IDUKA) dalam Meningkatkan Kompetensi Siswa (Studi Kasus di SMK Wiraswasta dan SMK PGRI 3 Kota Cimahi). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4). <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i5.496>
- Harliansyah, H., Hanim, Z., & Azainil, A. (2022). Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri Kota Samarinda. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(3), 13–28. <https://doi.org/10.51278/aj.v4i3.389>
- Hartanto, C. F. B., Rusdarti, R., & Abdurrahman, A. (2019). Tantangan Pendidikan Vokasi di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 2(1), 163–171. <https://proceeding.unnes.ac.id/snpsasca/article/download/267/394>
- Hartley, D. (2023). Education Policy, Distributed Leadership and Socio-Cultural Theory. In *Mapping the field* (pp. 199–210). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003403708-17/education-policy-distributed-leadership-socio-cultural-theory-david-hartley>
- Hidayati, A., Barr, F. D., & Sigit, K. N. (2021). Kesesuaian Kompetensi Lulusan SMK dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 284–292. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.39508>
- Husni, I. N., Giatman, M., & Ernawati, E. (2024). Analisis Manajemen Berbasis Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan: Studi Literatur. *Journal of Education Research*, 5(3), 3170–3180. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1456>
- Indicators, O. (2013). *Education at a Glance 2016 OECD INDICATORS*. OECD Publishing.
- Irwanto, I. (2021). Link and Match Pendidikan Kejuruan dengan Dunia Usaha dan Industri di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 549–562. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i2.714>
- Ismiatun, S. R., Neliwati, N., Khairuddin, K., & Rofiq, M. H. (2023). Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kerja Sama dengan Dunia Industri. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen*

- Pendidikan Islam*, 5(1 SE-Articles), 61–72. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v5i1.766>
- Kaltim Faktual. (2023). SMK di Kaltim Kekurangan Guru, Disdik Dorong Kolaborasi dengan Dunia Industri. *Kaltimfaktual.Co.Id*. https://kaltimfaktual.co/smk-di-kaltim-kekurangan-guru-disdik-dorong-kolaborasi-dengan-dunia-industri/?utm_source=chatgpt.com
- Kemdikbud RI. (2023). *Daftar 10 SMK Terbaik di Kab. Kutai Timur*. Kemdikbud.Co.Id. https://www.kemdikbud.co.id/data/top-10-smk-terdekat-di-kab-kutai-timur/?utm_source=chatgpt.com#!
- Kemdikbudristek. (2022). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020–2024*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kesumadewi, E., & Aprilyani, A. (2024). Mengatasi Pengangguran Melalui Peningkatan Kewirausahaan dengan Program Tenaga Kerja Mandiri. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4 SE-Articles), 1–15. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.360>
- Kumendong, A., Pangemanan, S. S., & Pandowo, M. (2018). The Analysis of Soft Skill for Employee Performance in Banking Industry. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v6i4.21907>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Marginingsih, P., Kusumaningsih, W., & Violinda, Q. (2025). Manajemen Digitalisasi Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Akademik Di SMA Negeri 1 Karangrayung. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(2), 312–327. <https://doi.org/10.37329/cetta.v8i2.4174>
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Munthe, F., & Mataputun, Y. (2021). Analisis Kerjasama Sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(4), 586–593. <https://doi.org/10.29210/020211479>
- Novita, D., & Nuriadin, I. (2023). Implementasi Edupreneurship untuk Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Melalui Teaching Factory dan Bussines Center di Smkn 3 Kota Bekasi. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 707–726. <https://doi.org/10.46306/vls.v3i2.189>
- Nurtanto, M., Ramdani, S. D., & Nurhaji, S. (2017). Pengembangan Model Teaching Factory di Sekolah Kejuruan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 1(2). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/447-454>
- Raimon Efendi, R. E., & Ratih Agustin Wulandari, R. A. W. (2020). *Model Competency Based e-Learning Pendidikan Vokasi*. CV. Muharika Rumah Ilmiah.
- Scarpetta, S., & di Noia, C. (2023). Pensions at a Glance 2023: OECD AND G20 INDICATORS. *Pensions at a Glance*.
- Sudiyono, S. (2017). Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sma Dan Smk. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 10(2), 81–106.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaeman, Z. M., Nurlaeli, A., & Ma'shum, S. (2024). Implementasi Kurikulum Pusat Keunggulan Melalui Program Magang Industri di SMK 1 Cikarang Selatan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(2 SE-Articles), 29 – 35. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i2.476>
- Wahidah, A. N., & Istiyono, E. (2020). Kesenjangan Antara Kebutuhan dan Ketersediaan Guru SMA/SMK Di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 8(1), 165–178.
- Yuliansah, Y., & Rasyid, A. A. (2015). Efektivitas Unit Produksi sebagai Sumber Belajar Kewirausahaan di SMK Kota Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan UNY*, 22(4), 443–453. <https://doi.org/10.21831/jptk.v22i4.7842>

Yusof, M. H. M., Arsat, M., Amin, N. F., & Latif, A. A. (2020). Issue and Challenge for Vocational Teaching Quality in the Vocational College Lecturers: A Systematic Review/Isu dan Cabaran Kualiti Penyampaian Pengajaran Bidang Vokasional dalam Kalangan Pensyarah Kolej Vokasional: Satu Ulasan Sistematik. *Sains Humanika*, 12(2-2). <https://doi.org/10.11113/sh.v12n2-2.1779>